

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah lembaga negara yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan peran penting dalam sistem politik Indonesia, khususnya dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran. DPR memiliki fungsi utama untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan anggaran negara. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun dan terdiri dari perwakilan partai politik[3].



Gambar 2.1. Logo DPR-RI

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) adalah lembaga yang memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian kepada DPR RI. Tugas utama Setjen DPR RI meliputi menyediakan layanan administrasi untuk

mendukung kelancaran tugas-tugas anggota DPR, memberikan bantuan teknis dan logistik untuk kegiatan legislasi, pengawasan, dan anggaran, serta menyediakan tenaga ahli dan kajian untuk mendukung tugas-tugas anggota DPR. Setjen DPR RI dikepalai oleh seorang Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua DPR RI[4].



Gambar 2.2. Logo Sekretariat Jendral DPR-RI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekinfo) adalah unit di bawah Setjen DPR RI yang bertanggung jawab atas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Fungsi utama Pustekinfo meliputi mengembangkan dan mengelola sistem informasi untuk mendukung kegiatan DPR RI, menyediakan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta menyediakan layanan informasi dan komunikasi yang mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pustekinfo berperan penting dalam memastikan bahwa DPR RI dapat beroperasi dengan efisien menggunakan teknologi informasi modern serta memastikan aksesibilitas informasi bagi publik dan *stakeholder*. Dengan adanya ketiga entitas ini, DPR RI dapat menjalankan tugasnya dengan dukungan administrasi, teknis, dan teknologi informasi yang optimal, serta menjamin transparansi dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya[5].



Gambar 2.3. Logo Pustekinfo

## 2.2 Visi dan Misi Perusahaan

- Visi Mewujudkan inspektorat utama yang profesional, independen, akuntabel, dan berintegritas dalam rangka mendukung peningkatan Kinerja sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI.

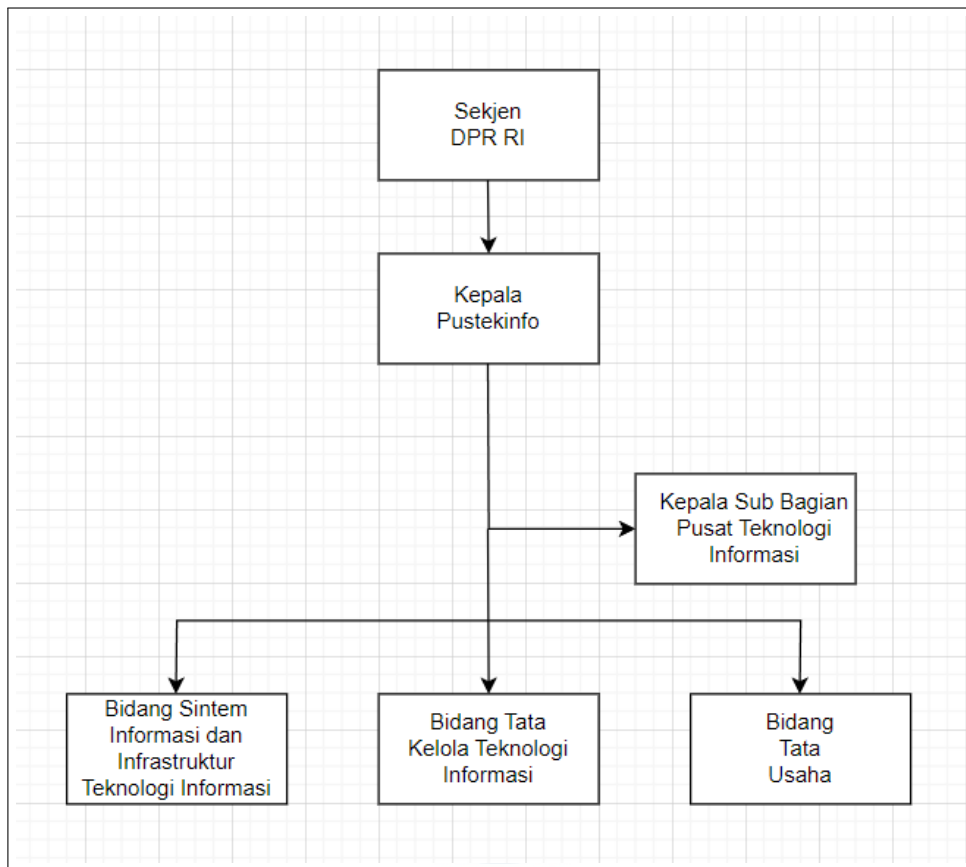
- Misi

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dilingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI;
2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern dilingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI;
3. Mengembangkan kapasitas inspektorat utama yang profesional dan kompeten.

## 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut struktur organisasi yang ada di DPR RI terlihat pada Gambar

### 2.4. Struktur organisasi DPR-RI



Gambar 2.4. Struktur organisasi DPR-RI

Struktur organisasi yang ditampilkan pada Gambar 2.4. Struktur organisasi DPR-RI di atas menunjukkan hierarki dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan DPR RI, khususnya di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekjen DPR RI, sebagai posisi tertinggi, bertanggung jawab atas keseluruhan operasional administratif dan teknis di DPR RI dan mengawasi berbagai unit di bawahnya, termasuk Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekinfo). Kepala Pustekinfo, yang berada di bawah Sekjen, memimpin pengelolaan semua aspek teknologi informasi dan komunikasi.

Di bawah Kepala Pustekinfo terdapat Kepala Sub Bagian Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) yang membantu mengkoordinasikan aktivitas Pustekinfo dan mengawasi tiga bidang utama. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi bertugas mengembangkan dan mengelola sistem informasi serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung kegiatan DPR RI. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi bertanggung jawab atas kebijakan,

prosedur, dan standar terkait penggunaan teknologi informasi, memastikan kesesuaiannya dengan regulasi dan efektivitas operasional. Sedangkan, Bidang Tata Usaha menangani aspek administratif dan operasional Pustekinfo, memastikan administrasi dan logistik yang mendukung kegiatan berjalan dengan lancar dan efisien.

Dengan struktur ini, jelas terlihat alur komando dan tanggung jawab dari Sekjen DPR RI hingga unit-unit teknis yang spesifik, yang memastikan bahwa fungsi teknologi informasi dan komunikasi di DPR RI dikelola dengan baik dan mendukung tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran.

